

Sembilan Poktan di Tala Dapat Hibah Ternak Ruminansia Hingga Mesin Pencacah Rumput, Ini Rinciannya



PENINJAUAN bangunan (gudang) olahan pakan ternak di Desa Asri Mulya, Kamis (11/7) siang.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/PENINJAUAN-bangunan-gudang-olahan-1.jpg>

Angin segar melingkupi kalangan petani di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Ini menyusul penyaluran bantuan hibah dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

Bantuan hibah yang disalurkan meliputi beragam jenis, mulai ternak ruminansia hingga mesin pencacah rumput. Tercatat sembilan kelompok tani (KT) yang menerima bantuan hibah bersumber dari APBD Pemkab Tala tersebut.

Penyerahan hibah Disnak Keswan Tala tersebut bertempat di lingkungan KT Sri Rejeki Desa Asri Mulya, Kecamatan Jorong. Tuan rumah mengemas acara penyerahan bantuan hibah tersebut secara cukup meriah bak menggelar hajatan.

Selain disediakan aneka makanan, juga ada suguhan hiburan dari Paguyuban Seni Kuda Lumpung Campur Sari Manunggal Budaya Desa Asri Mulya yang tampil sejak pagi hingga sore.

Hadir Asisten II Pemkab Tala Andris Evony mewakili pj bupati yang sekaligus secara simbolis menyerahkan bantuan hibah tersebut bersama Ketua DPRD Tala Muslimin SE serta Kadisnak Keswan Tala H Iwan Persada.

"Ini bentuk komitmen Pemkab Tala untuk menyejahterakan petani dan mengembangkan ternak sapi dan kerbau khususnya," ucap Andris saat wawancara dengan wartawan sesuai meninjau bantuan hibah bangunan gudang olahan pakan ternak.

Ia mengatakan bantuan hibah tersebut tak terlepas dari dukungan DPRD Tala. Diharapkan ke depan dapat menjadi program berkelanjutan, tidak hanya satu tahun saja namun selama lima tahun selama satu periode masa kepemimpinan kepala daerah.

"Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD Tala dalam upaya bersama untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada sektor peternakan," tandas Andris.

Program dari hulu ke hilir tersebut diharapkan dapat terlaksana atau berjalan lancar. Dengan begitu pengembangan ternak ruminansia yang diusahakan para petani kian meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu Iwan menyebutkan pada tahun ini ada sembilan kelompok tani yang mendapatkan bantuan hibah tersebut. "Kami sangat berterimakasih kepada DPRD yang telah menyetujui anggaran program ini sehingga bantuan hibah ini dapat direalisasikan," tandasnya.

Ia menuturkan bantuan hibah tersebut terpilah pada tiga program kegiatan. Pertama, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima 5 kelompok tani.

Kedua, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian dengan penerima 1 kelompok tani. Ketiga, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Kegiatan:Pembangunan Prasarana Pertanian) dengan jumlah penerima 3 kelompok tani

Para penerima bantuan hibah itu pun sangat senang. "Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan hibah ini. Sungguh bantuan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha peternakan kami," ucap Ponari, ketua Kelompok Tani Sri Rejeki.

Anggota kelompok taninya saat ini sebanyak 26 orang. Bantuan hibah yang diterima berupa bangunan gudang olahan pakan ternak (ruminansia) lengkap dengan mesin pencacah rumput hingga puluhan tong silase.

Berikut ini rincian bantuan hibah yang disalurkan Disnak Keswan Tala: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Tani Penerima

1. KT Mulya Jaya

- Alamat: Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong

- Hibah berupa 5 ekor bibit sapi Bali betina, 1 paket obat-obatan (antibiotik hewan, desinfektan 5 liter, obat cacing, probiotik/EM4, dan multivitamin hewan)

2. KT Sumber Mulya Abadi

- Alamat Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong

- Hibah berupa 5 ekor bibit sapi Bali betina, 1 paket obat-obatan (antibiotik hewan, desinfektan 5 liter, obat cacing, probiotik/EM4, dan multivitamin Hewan)

3. KT Bimas Karya

- Alamat:Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong

- Hibah berupa 5 ekor bibit sapi Bali betina, 1 paket obat-obatan (antibiotik hewan, desinfektan 5 liter, obat cacing, probiotik/EM4, dan multivitamin Hewan)

4. KT Mekar Sari

- Alamat:Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong

- Hibah berupa 5 ekor bibit sapi Bali betina, 1 paket obat-obatan (antibiotik hewan, desinfektan 5 liter, obat cacing, probiotik/EM4, dan multivitamin Hewan)

5. KT Suka Maju 1

- Alamat Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati

- Hibah berupa 10 ekor bibit kerbau betina, 1 paket obat-obatan (antibiotik hewan, desinfektan 5 liter, obat cacing, probiotik/EM4, dan multivitamin Hewan)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian

1. Kelompok Tani Sri Rejeki

- Alamat Desa Asri Mulya, Kecamatan Jorong

- Hibah berupa 1 unit bangunan gudang olahan pakan ternak (ruminansia), 1 unit hammer mill, 1 unit chopper rumput, 1 unit mesin sprayer, 1 unit timbangan mekanik, 50 buah tong silase, 1 buah gerobak dorong, 1 pasang sepatu boot, 2 buah cangkul, 1 buah sekop, 1 buah garu, 4 buah ember

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Kegiatan:Pembangunan Prasarana Pertanian)

1. KT Kuba Karya Budi

- Alamat Desa Kayu Abang

- Hibah berupa 1 unit mesin chopper rumput

2. KT Sembodho

- Alamat Desa Tebing Siring 1 Dusun II RT 07

- Hibah berupa 1 unit mesin chopper rumput

3. KT Teratai Makmur

- Alamat Jalan Teratai I RT 08 RW 03 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari

- Hibah berupa 1 unit mesin chopper sawit.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kali ini, bantuan hibah diberikan kepada BUMDesa Bina Karya Desa UPT Karya Bakti Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 90.000.000,00.

Sebelumnya, dana hibah serupa telah diserahkan di BUMDesa Karya Sejahtera Desa Raden Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 45.000.000,00 dan BUMDesa Bina Usaha Bersama Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 70.932.000,00.

Sahbirin mengatakan, pihaknya bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel memang terus berkomitmen dalam mengembangkan BUMDes di Banua agar visi misi Kalsel Maju dalam memajukan desa dapat terwujud.

Memang dana hibah BUMDes di tahun ini difokuskan dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian desanya, ungkap Sahbirin, Tanah Bumbu, Rabu (03/07/2024).

Sahbirin pun berkeinginan kedepannya akan lebih mendorong lagi BUMDes agar bisa lebih berkreasi, berkembang dengan menambah usahanya. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, BUMDes berperan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa dan optimalisasi yang sehat dan kuat secara ekonomi dan kelembagaan menjadi kekuatan strategis untuk dapat melakukan percepatan pembangunan kawasan pedesaan.

Mudah-mudahan BUMDes tidak hanya menguntungkan untuk pemerintah desa tetapi bisa berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, kata Faried.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/11/sembilan-poktan-di-tala-dapat-hibah-ternak-ruminansia-hingga-mesin-pencacah-rumput-ini-rinciannya?page=all>
2. https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Gubernur_Kalsel_Didampingi_Ketua_TP_PKK_Kalsel_Berikan_Dana_Hibah

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan